

**KERJASAMA PERTAHANAN TIMOR-LESTE - AUSTRALIA  
DALAM KOMPETISI AUSTRALIA – TIONGKOK (2013-2022)**

**TESIS**



**Oleh:**

**Augusto Soares  
8092001011**

**Pembimbing Tunggal:**

**Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs.,M.A.**

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
2023**

**HALAMAN PESETUJUAN**

**KERJASAMA PERTAHANAN TIMOR-LESTE - AUSTRALIA  
DALAM KOMPETISI AUSTRALIA – TIONGKOK (2013-2022)**



**Oleh:**

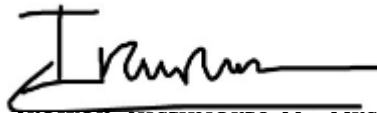
**Augusto Soares**

**8092001011**

**Persetujuan Untuk Sidang Tesis Pada Hari/Tanggal:**

**Selasa, 24 Januari 2023**

**Pembimbing Tunggal:**



**Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs., M.A.**

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Augusto Soares

N.P.M.: 8092001011

Program Studi: Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

“KERJASAMA PERTAHANAN TIMOR-LESTE - AUSTRALIA DALAM  
KOMPETISI AUSTRALIA – TIONGKOK (2013-2022)”

Adalah benar-benar karya saya sendiri dibawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara tidak sesuai dengan cintra keilmuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 24/01/2023

Tanggal :  


Augusto Soares

# **KERJASAMA PERTAHANAN TIMOR-LESTE - AUSTRALIA DALAM KOMPETISI AUSTRALIA – TIONGGOK (2013-2022)**

**Augusto Soares, (8092001011)**

**Pembimbing: Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs., M.A.**

**Magister Ilmu Hubungan Internasional**

**Bandung**

**2023**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste dalam kompetisi Australia – Tiongkok periode 2013-2022. Selama satu dekade terakhir terjadinya ketegangan antara Australia – Tiongkok, serta adanya kedekatan Tiongkok dengan Timor-Leste dalam bidang pertahanan, merupakan kekhawatiran tersendiri bagi Australia sebagai rivalnya bahwa Tiongkok sedang memperlancarkan strategi pertahanan lautnya yang optimal dalam konsistensinya sebagai *maritime power*. Sedangkan bagi Timor-Leste merupakan peluang untuk meningkatkan kemampuan F-FDTL yang profesional dalam menjamin stabilitas dan keamanan nasionalnya. Selanjutnya masalah yang menjadi bahasan dari penelitian ini adalah bagaimana kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Timor-Leste dan Australia dalam kompetisi Australia – Tiongkok selama sepuluh tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan militer (Galbreath dan Deni) untuk mengevaluasi kerjasama antara Timor-Leste – Australia dan Timor-Leste – Tiongkok, serta konsep keamanan maritim (Lutz Feldt) untuk melihat langkah pencegahan dan responsif terhadap kedekatan Tiongkok di kawasan Laut Timor. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Timor-Leste dan Australia melalui pelatihan militer profesional, logistik dan pengadaan militer, serta latihan gabungan bersama. Serta dalam kerjasama tersebut merupakan kombinasi langkah pencegahan dan responsif untuk melindungi domain maritim yang bertujuan menjamin stabilitas dan keamanan nasional serta perdamaian dan stabilitas kawasan.

Kata Kunci: Kerjasama, Keamanan Militer, Keamanan Maritim, Timor-Leste, Australia, Tiongkok

**TIMOR-LESTE – AUSTRALIA DEFENCE COOPERATION ON  
COMPETITION OF AUSTRALIA – TIONGKOK (2013-2022)**

**Augusto Soares, (8092001011)**  
**Advisor: Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs., M.A.**  
**Master of International Relations**  
**Bandung**  
**2023**

**ABSTRACT**

*This study aims to understand the defense cooperation carried out between Australia and Timor-Leste in the Australia – China competition for the 2013-2022 period. Over the past decade, the tensions between Australia and China, as well as the closeness between China and Timor-Leste in the field of defense, is a separate concern for Australia as its rival that China is pursuing its optimal maritime defense strategy in its consistency as a maritime power. Meanwhile for Timor-Leste it is an opportunity to enhance the professional capabilities of F-FDTL in ensuring its national stability and security. Furthermore, the problem that is the subject of this research is how defense cooperation has been carried out between Timor-Leste and Australia in the Australia-China competition over the past ten years. This study uses the concept of military security by Galbreath and Deni to evaluate cooperation between Timor-Leste – Australia and Timor-Leste – China, as well as the concept of maritime security by Lutz Feldt to look at preventive and responsive steps towards China's proximity in the Timor Sea region. The results obtained from this research are an increase in defense cooperation carried out between Timor-Leste and Australia through professional military training, military logistics and procurement, as well as joint combined exercises. As well as in this cooperation is a combination of preventive and responsive steps to protect the maritime domain which aims to ensure national stability and security as well as regional peace and stability.*

*Keyword: Cooperation, Military Security, Maritime Security, Australia, Timor-Leste, China*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Terima kasih kepada keluarga besar penulis, Ayah dan Ibu serta istri dan anak saya di Timor-Leste, yang selalu memberikan dukungan, serta mendoakan keberhasilan studi penulis. Serta penulis juga berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa Timor-Leste yang kuliah di Bandung tidak bisa sebutkan satu per satu, atas bantuan dan pengingat dalam proses penyelesaian studi penulis.

Penulis juga tidak lupa berterima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui program Beasiswa KNB (Kemitraan Negara Berkembang) Angkatan 2019-2020, yang telah membiayai studi penulis hingga 2022-2023 dan menempuh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman seangkatan dan senior MHI, Bung Julio, Bung Ismail, Bung Damar, Bung Daniel, Mba Amira, Mba Aulia, Mba Zia, Mba Galuh, Mba Gloria, Mba Grace, Bung Ilham, Bung Vercia, Mba Deah, Mba Mae, serta teman-teman yang lupa menyebutkan disini yang selalu membantu, mengingatkan, dan penyemangat dalam proses studi dan penulisan tesis penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota International Office (IO) UNPAR yang tidak disebutkan satu per satu, yang selama ini telah mengingatkan dan memberi masukan serta menunjukkan proses menempuh studi Magister penulis selama kuliah di UNPAR-Bandung, segala bentuk bantuan yang berarti dan tidak dapat tergantikan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku pembimbing mata kuliah yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan. Serta khususnya dalam penulisan Tesis ini, terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Bapak Irawan selaku pembimbing Tesis penulis, Bapak Nyoman selaku Penguji I, dan Bapak Yulius selaku Penguji II dalam penulisan tesis penulis hingga Sidang Akhir. Tak lupa pula berterima kasih kepada Bapak Leo Bambang yang selama proses pengajuan sidang awal sampai dengan sidang akhir tesis telah membantu penulis memperlancar proses tersebut.

Akhir kata mohon maaf sebesar-besarnya dari penulis ucapkan kepada rekan-rekan serta Bapak dan Ibu, yang penulis lupa menyebutkan dalam penulisan tesis ini, serta permohonan maaf juga atas kelalaian dan kesalahan yang telah penulis perbuat agar dapat dimaafkan. Terima kasih banyak untuk semuanya.

Bandung, 24 Januari 2023



Augusto Soares

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Pembatasan Masalah</b> .....	7
<b>1.4 Perumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	8
<b>1.5.1 Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.5.2 Kegunaan Penelitian</b> .....	9
<b>1.6 Literatur Terdahulu</b> .....	9
<b>1.7 Kerangka Konseptual</b> .....	12
<b>1.7.1 Konsep Kerjasama</b> .....	12
<b>1.7.2 Konsep Keamanan Maritim (<i>Maritime Security Concept</i>)</b> .....	14
<b>1.7.3 Konsep Keamanan Militer</b> .....	16
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	18
<b>1.9 Sistematika Penulisan</b> .....	19
<b>BAB II</b> .....	20
<b>KONSEP KEAMANAN MILITER MENURUT DAVID J. GALBREATH DAN JOHN R. DENI</b> .....	20
<b>2.1. Pengertian Keamanan Militer</b> .....	20
<b>2.2. Jenis Keamanan Militer</b> .....	21
<b>2.2.1. Pendidikan Militer Profesional (<i>Professional Military Education / PME</i>)</b> .....	21
<b>2.2.2. Logistik dan Pengadaan Militer (<i>Military Logistic and Procurement</i>)</b> ....	22
<b>2.2.2.1. Logistik Militer (<i>Military Logistic</i>)</b> .....	22
<b>2.2.2.2. Pengadaan Militer (<i>Military Procurement</i>)</b> .....	24



2.2.3.	Latihan/Operasi Gabungan Bersama ( <i>Joint Combined Operation</i> ).....	25
2.2.3.1.	Rencana Latihan/Operasi Bersama ( <i>Joint Operation Planning</i> ).....	25
2.2.3.2.	Analisis Lanjutan ( <i>Advanced Analysis</i> ) .....	28
2.2.3.3.	Komando dan Kontrol ( <i>Command and Control</i> ) .....	29
<b>BAB III.</b>	.....	<b>30</b>
<b>HUBUNGAN AUSTRALIA - TIONGKOK DAN KERJASAMA PERTAHANAN TIMOR-LESTE - TIONGKOK</b>	.....	<b>30</b>
3.1.	Hubungan Australia – Tiongkok.....	30
3.1.1.	Ketegangan Hubungan Australia dan Tiongkok Dalam Kasus CADIZ	31
3.1.2.	Australia Menentang Peta Sembilan Garis Putus ( <i>Nine-dash Line Map</i> ) Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan .....	33
3.1.3.	Tiongkok Ancam Australia Dengan Rudal Balistik .....	35
3.1.4.	Australia Membeli Kapal Selam Nuklir Dalam Perjanjian AUKUS .....	36
3.1.5.	Perjanjian Pakta Keamanan Sino-Solomon .....	37
3.1.6.	Pencegatan Pesawat dan Pengintaian Kapal Perang Tiongkok Terhadap Australia .....	39
3.2.	Kerjasama Pertahanan Timor-Leste – Tiongkok .....	40
3.2.1.	Kerjasama Pertahanan Timor-Leste dan Tiongkok Dalam Aspek Pendidikan/Latihan Militer Profesional .....	40
3.2.2.	Kerjasama Pertahanan Timor-Leste dan Tiongkok Dalam Aspek Logistik dan Pengadaan Militer .....	43
3.2.2.1.	Sebelum Periode 2013-2022.....	43
3.2.2.2.	Dalam Periode 2013-2022.....	45
<b>BAB IV</b>	.....	<b>47</b>
<b>KERJASAMA PERTAHANAN TIMOR-LESTE DAN AUSTRALIA PERIODE 2013-2022</b>	.....	<b>47</b>
4.1	Rencana Pembangunan Yang Digunakan Dalam Meningkatkan Program Kerjasama Pertahanan ( <i>Defence Cooperation Program / DCP</i> ) Antara Timor-Leste dan Australia Periode 2013-2022.....	47
4.1.1	Rencana Pembangunan Strategis Timor-Leste 2011-2030 ( <i>Timor-Leste Strategic Development Plan 2011-2030</i> ).....	48
4.1.2	Rencana Pembangunan Pertahanan Membela Australia di Abad Asia- Pasifik: Angkatan 2030 ( <i>Defending Australia in the Asia-Pacific Century: Force 2030</i> ).....	51
4.1.3	Penandatanganan Perjanjian <i>Defence Cooperation Talk (DCT)</i> Antara Australia dan Timor-Leste .....	54
4.2	Pola Kerjasama Pertahanan Timor-Leste dan Australia Dalam Periode 2013-2022.....	55

4.2.1	<b>Kerjasama Pertahanan Timor-Leste dan Australia Dalam Aspek Pendidikan/Latihan Militer Profesional (<i>Professional Military Education/Training</i>)</b> .....	56
4.2.2	<b>Kerjasama Pertahanan Timor-Leste dan Australia Dalam Aspek Logistik dan Pengadaan Militer (<i>Logistic and Procurement of Military</i>)</b> ....	57
4.2.3	<b>Kerjasama Pertahanan Timor-Leste dan Australia Dalam Aspek Latihan/Operasi Gabungan Bersama (<i>Joint Combined Operation</i>)</b> .....	60
<b>BAB V</b>	.....	64
<b>PENUTUP</b>	.....	64
5.1	<b>Kesimpulan</b> .....	64
5.2	<b>Rekomendasi</b> .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada abad ke-21, dunia internasional terus menerus melahirkan tantangan baru yang membuat entitas negara harus selalu siap. Timor-Leste merupakan negara yang baru merdeka dan diakui secara internasional di awal abad ke-21, dimana direstorasikan pada 20 Mei 2002, yang mana telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1975 silam, tepatnya pada tanggal 28 November.<sup>1</sup> Menjadi sebuah negara baru, tentunya Timor-Leste dihadapkan dengan berbagai macam tantangan untuk menjamin eksistensi kedaulatannya. Dimana Timor-Leste memproyeksikan dirinya dalam bidang-bidang dasar untuk menjamin eksistensi kedaulatannya yakni dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya.

Salah satu bidang dasar yang sangat penting bagi sebuah negara untuk menjamin kedaulatannya yang berkelanjutan maka badan pertahanan nasionalnya perlu dipenuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Buzan bahwa “Sepanjang sejarah masing-masing negara telah dibuat tidak aman oleh keberadaan yang lain, dan tindakan masing-masing negara dalam mengejar keamanan nasionalnya sendiri sering digabungkan dengan tindakan pihak lain untuk menghasilkan perang dan ancaman yang paling mungkin bagi kelangsungan spesies kita dikarenakan masalah keamanan nasional terletak pada akar perang, sehingga sangat penting untuk menanganinya”.<sup>2</sup> Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa sebuah negara tidak dapat menjamin keamanan bagi masyarakatnya dari ancaman luar tanpa memiliki suatu lembaga pertahanan yang secara struktur memiliki strategi pertahanan yang mapan.

Timor-Leste yang tergolong masih baru dalam meraih kemerdekaannya dan ditambah pula dengan baru terlepas dari koloni Portugis di tahun 1974 dan pendudukan Republik Indonesia pada tahun 1999, sangatlah pasti memiliki

---

<sup>1</sup> Konstituisaun RDTL, Hal. 6. Diakses dalam [http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constituicao\\_RDTL\\_TT.pdf](http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constituicao_RDTL_TT.pdf) (In English [http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constitution\\_RDTL\\_ENG.pdf](http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constitution_RDTL_ENG.pdf))

<sup>2</sup> Buzan B. *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. WheatSheaf Books Ltd. Great Britain, 1983. Hal, 1.

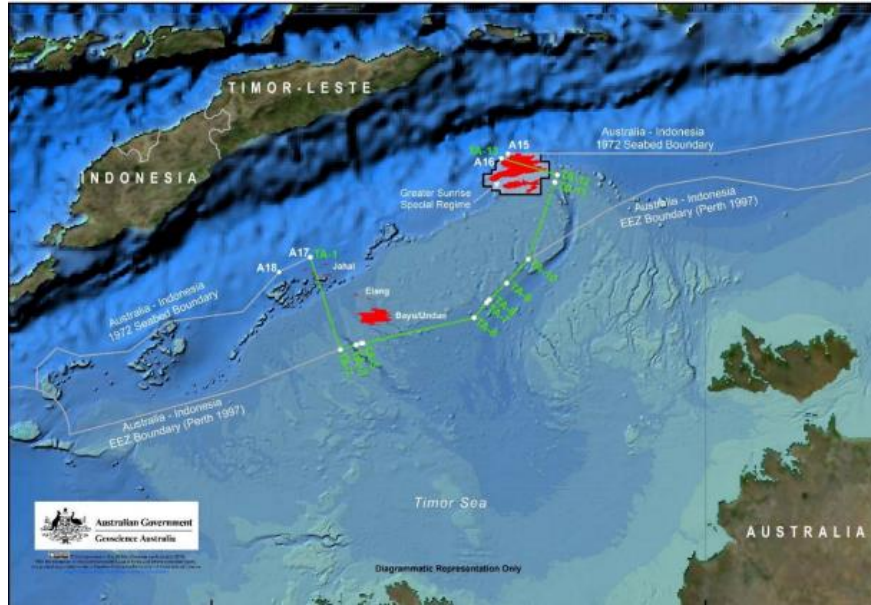
keterbatasan-keterbatasan lebih khususnya keterbatasan sumber daya manusia dan tenaga ahli dalam membangun badan pertahanan nasionalnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam badan pertahanan nasional yang dimiliki oleh Timor-Leste, sangat berpotensi terjadinya aktivitas-aktivitas kejahatan baik keamanan tradisional maupun keamanan non-tradisional, lebih khususnya di perairan Laut Timor seperti *arms trafficking, illegal fishing, drug trafficking, illegal trade, human trafficking*, dan lain-lain yang dapat merugikan bagi Timor-Leste sendiri serta bagi negara tetangga seperti Australia.

Timor-Leste sebagai negara kepulauan maritim, dan secara terpadu harus mengkonsolidasikan keamanan maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Laut Timor adalah wilayah perairan yang secara teknis juga merupakan jalur samudera Hindia, yang berada dibagian tenggara yang termasuk dalam wilayah teritorial Timor-Leste. Laut Timor berbatasan dengan perairan Indonesia bagian timur, meskipun sampai saat ini belum ada perjanjian yang menentukan batas laut yang permanen sesuai tapal batas kedua negara. Disamping itu juga berbatasan dengan perairan pulau Melville dan kepulauan Ashmore, serta Cartier bagian selatan Australia, berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam *Maritime Boundary Treaty* antara Timor-Leste dan Australia.<sup>3</sup> Batas laut antara Timor-Leste dan Australia dapat terlihat dalam gambar 1.1 dibawah.

---

<sup>3</sup> Australia and Timor-Leste Maritime Boundaries: Rules-Based Order in Action. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. 6 March 2018. Hal. 1. Diakses dalam <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/aus-timor-maritime-boundary-fact-sheet.pdf> (25/11/2021)

Gambar 1.1 Batas Laut Timor-Leste - Australia



Sumber: *dfat.gov.au*<sup>4</sup>

Laut Timor juga berbatasan dengan Samudra Hindia itu sendiri di sebelah barat. Menurut Jun Suzuki-San seorang wartawan terkenal dari Jepang menyatakan bahwa Laut Timor berada di titik strategis geopolitik, dimana sebagai penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudera Hindia, yang dapat meningkatkan kehadiran negara lain tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara militer.<sup>5</sup>

Dari strategi geopolitik tersebut, dapat dikatakan bahwa keamanan terkait Laut Timor sangatlah penting untuk diperhatikan karena adanya persepsi tentang masalah keamanan bahwa adanya ancaman dari negara lain serta kekhawatiran terhadap kekuatan militer antar negara. Dimana mengingat bahwa Keamanan Laut (*Maritime Security*) memiliki posisi signifikan bagi kekuatan-kekuatan besar di tingkat regional dan global dalam hubungan internasional yang didorong oleh kepentingan keamanan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Melihat pada kondisi strategis geopolitik di Laut Timor, menjadi perhatian khusus bagi Australia dengan beranggapan bahwa Timor-Leste yang masih dikategorikan memiliki kemampuan yang kurang dalam menjamin keamanan nasionalnya, dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang akhirnya menjadi ancaman

<sup>4</sup> Ibid. Hal. 2.

<sup>5</sup> Chinese Influence in TIMOR-Leste? Who is too worried about it? By José Manuel Ramos-Horta 2017. Hal.1. Diakses dalam <https://defence.pk/pdf/threads/chinese-influence-in-timor-leste-whois-too-worried-about-it.515592/> (25/11/2021. 14:21.WIB)

bagi Australia, serta menjadi peluang bagi meningkatnya kekuatan asing di kawasan tersebut. Sehingga mendorong Timor-Leste dan Australia perlu melakukan kerjasama di bidang Pertahanan Nasional Timor-Leste. Sedangkan Timor-Leste sendiri dengan kondisi strategis geopolitik dari Laut Timor menginginkan kawasan yang stabil dan aman. Sehingga penting bagi Timor-Leste untuk melakukan kerjasama dengan beberapa negara terutama negara tetangga seperti Australia dan Indonesia serta beberapa negara di luar kawasan seperti Tiongkok dan Amerika Serikat serta beberapa negara lain untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam melakukan hubungan kerjasama, Timor-Leste berpegang pada kebijakan luar negerinya yang memprioritaskan kerjasama dengan negara tetangga dan negara lain di kawasan tersebut, dimana telah dikukuhkan dalam konstitusi Timor-Leste sendiri bahwa Republik Demokratik Timor-Leste akan memelihara persahabatan dan kerjasama dengan negara tetangga dan negara-negara kawasan.<sup>6</sup>

Dalam penulisan tesis ini, penulis ingin memaparkan bentuk kerjasama di bidang pertahanan antara Timor-Leste dan Australia yang lebih khususnya untuk menjamin keamanan dan stabilitas di Laut Timor, serta kerjasama keamanan bilateral antara Timor-Leste dan Tiongkok. Dimana hubungan kerjasama keamanan bilateral yang dibangun antara Timor-Leste dan Tiongkok, Australia melihat bahwa kerjasama tersebut merupakan kedekatan Tiongkok di kawasan tersebut yang menjadi kekhawatiran bagi Australia sebagai peluang atau berpotensi meningkatnya kekuatan asing di masa yang akan datang dan akan menjadi ancaman juga bagi Australia dan Timor-Leste di kawasan tersebut.

Bentuk kerjasama pertahanan yang terjalin antara Timor-Leste dan Australia adalah Program Kerjasama Pertahanan / *Defence Cooperation Program (DCP)* yang telah dilakukan sejak tahun 2001 dengan tujuan untuk membantu Timor-Leste membangun Lembaga pertahanannya secara profesional serta kompeten dalam bidang militer. Melalui kerjasama tersebut, didirikannya *FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste* atau disingkat *F-FDTL* sebagai pertahanan nasional Timor-Leste. Dalam Program Kerjasama Pertahanan (*Defence Cooperation Program/DCP*) dalam sepuluh tahun pertama (2002-2012) Australia dengan

---

<sup>6</sup> Konstituisaun RDTL, Op. Cit. Hal. 10.

Timor-Leste berfokus pada pengembangan kemampuan dalam keterampilan bahasa Inggris (*English Language Skill*), keamanan maritim (*maritime security*), teknik (*Technic*), logistik (*logistic*), keterampilan Infanteri (*Infantry Skill*), pemerintahan (*governance*), keuangan (*financing*), dan komunikasi (*communication*) khususnya dalam bidang Pertahanan.<sup>7</sup>

Selain itu, melihat pada strategi geopolitik Laut Timor tersebut juga sebagai pendorong terjalinnya hubungan kerjasama keamanan antara Timor-Leste dan Tiongkok. Dimana Timor-Leste merupakan negara baru yang tentunya menginginkan peningkatan profesionalitas militernya.<sup>8</sup> Hal tersebut disampaikan menteri muda pertahanan Timor-Leste, Julio Tomas Pinto saat diwawancarai oleh Mark Davis seorang jurnalis dari media *Radio News Australia*. Menteri muda tersebut menyampaikan bahwa sebagai negara baru perlu belajar dari negara-negara besar yang memiliki pengalaman, ucapan tersebut tentu mengarah juga kepada Tiongkok. Julio Tomas Pinto juga menyampaikan bahwa Tiongkok bersedia membantu militer Timor-Leste dalam segala hal tergantung dari pihak Timor-Leste memintanya. Dimana melihat juga pada profesionalisme yang dimiliki militer Timor-Leste tidak sebanding dengan Tiongkok.<sup>9</sup>

Kerjasama pertahanan militer Timor-Leste dan Tiongkok dalam meningkatkan profesionalisme F-FDTL (FALINTIL-Força Defesa Timor Leste) dipicu oleh faktor kebutuhan domestik yakni perlengkapan militer untuk mengejar strategi pertahanan menuju *Forca 2020* yang telah dirancang pada tahun 2005, dengan prioritas utamanya adalah pertahanan laut karena laut adalah masa depan Timor-Leste (*O mar é o futuro de Timor-Leste*). Sehingga pemerintah berupaya meningkatkan jumlah alutsista militernya. Dalam program pemerintahan yang mengedepankan pertahanan laut, sehingga negara yang diajak bekerja sama memiliki kemampuan pertahanan laut yang kuat. Hal tersebut diperjelas dengan kerjasama yang dibangun antara Timor-Leste dan Tiongkok pada sektor pertahanan militer.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Australian Embassy. Defence Cooperation. Hal. 1. Diakses dalam <https://timorleste.embassy.gov.au/dili/Defence.html> (31/10/2021.14:30.WIB)

<sup>8</sup> East Timor is Caught In A Tug of War Between Australia and Tiongkok menit ke 9 diakses dalam <https://www.youtube.com/watch?v=CusgnKqbL-s>

<sup>9</sup>Ibid, menit ke 10.

<sup>10</sup> Op., Cit, hal., 145

Republik Rakyat Tiongkok telah mendanai pembangunan istana kepresidenan di Dili, kementerian luar negeri, dan markas besar pertahanan Timor-Leste pada tahun 2010. Pada tanggal 24 Agustus 2010, Timor-Leste menandatangani kontrak dengan Tiongkok untuk mendanai Markas Besar pertahanan senilai US\$ 9 juta. Selain itu juga Tiongkok telah membayar untuk gedung-gedung besar lainnya di Timor-Leste, termasuk istana kepresidenan, kementerian luar negeri dan markas besar serta perumahan militer.<sup>11</sup>

Sebelumnya, pada tahun 2008 terdapat pula kerjasama militer antara Timor-Leste dan Republik Rakyat Tiongkok melalui diadakannya pembelian dua kapal patroli dari perusahaan Tiongkok yang merupakan lanjutan dari penandatanganan perjanjian pembelian peralatan alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) untuk meningkatkan perlengkapan angkatan bersenjata di bulan April tahun yang sama. Dua kapal patroli Angkatan laut kelas Shanghai berbobot 175 ton sepanjang 43 meter yang dipasang Meriam 30 mm, buatan Tiongkok yang dirancang tahun 1960-an telah tiba di Timor-Leste pada saat hubungan yang tegang antara pemerintah koalisi empat partai di Dili yang dipimpin oleh mantan pejuang gerilya, Xanana Gusmao. Timor Leste membeli kapal dari sebuah perusahaan Tiongkok pada tahun 2008 tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Australia, yang telah menempatkan ratusan tentara di negara itu sejak tahun 2006.<sup>12</sup>

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penulisan tesis ini, terkait kerjasama *Defence Cooperation Program* antara Timor-Leste dan Australia yang difokuskan pada isu *Maritime Security* di Laut Timor, penulis mengidentifikasi adanya kebangkitan pengaruh militer Tiongkok di Asia Pasifik yang secara tidak langsung dikhawatirkan menjadi kekuatan asing di Laut Timor kedepannya. Hal tersebut terlihat melalui bantuan Tiongkok yang diberikan berupa dana untuk membangun Istana Kepresidenan

---

<sup>11</sup> Everingham, S. "Tiongkok, East Timor Strengthen Military Ties". ABC News, 24 Agustus 2010. Diakses dalam <https://www.abc.net.au/news/2010-08-24/Tiongkok-east-timor-strengthen-military-ties/956650> (25/02/2022.15:20.WIB)

<sup>12</sup> Murdoch, L. "Relations Strained as East Timor Buys Chinese Navy Boats". Sydney Morning Herald, 7 June 2010 <https://www.smh.com.au/world/relations-strained-as-east-timor-buys-chinese-navy-boats-20100606-xn5y.html> (25/2/2022.18:30.WIB)



Timor-Leste, gedung kementerian luar negeri, markas besar *F-FDTL* dan beberapa pelatihan tentara Timor-Leste.<sup>13</sup>

Selain itu kekhawatiran Australia juga muncul dengan adanya bantuan Tiongkok untuk militer Timor-Leste sejumlah 1 juta dolar US untuk pengadaan peralatan militer seperti tenda, seragam, dan kendaraan bermotor pada tahun 2002 hingga 2009. Ditambah dengan pemerintah Timor-Leste membeli 8 mobil Jeep bersenjata dari Tiongkok di tahun 2007. Serta Tiongkok juga membangun akomodasi untuk militer *F-FDTL* dengan menyediakan pendidikan di Tiongkok. Pada tahun 2008, Tiongkok juga meningkatkan perannya pada saat Timor-Leste membeli dua kapal patrol dari mereka untuk Angkatan Laut *F-FDTL* dengan kontrak senilai 25 juta dolar US dilengkapi dengan penyediaan pelatihan oleh Tiongkok bagi 40 militer dan pembangunan pelabuhan kecil di pesisir Selatan Timor-Leste.<sup>14</sup>

Meskipun Timor-Leste sampai sekarang belum menjalin aliansi militer yang mengikat dengan negara manapun, namun dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pertahanan Australia, menunjukkan bahwa Australia memiliki kepentingan untuk mencegah Timor-Leste menjalin aliansi militer yang mengikat dengan negara lain, khususnya aliansi militer dengan Tiongkok melalui pengaruh secara militer yang diberikan secara tidak langsung kepada Timor-Leste. Oleh karena itu, melalui *Defence Cooperation Program* merupakan sebuah alternatif yang diambil oleh negara Australia untuk melakukan pendekatan dalam membangun pertahanan Timor-Leste dengan tujuan menjamin keamanan maritim di Laut Timor, dimana Timor-Leste sendiri menjadikan Australia sebagai pilihan yang tepat sebagai partner keamanan agar mengimbangi dominasi pengaruh kekuasaan luar di Laut Timor.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian sebatas pada kerjasama yang digelar bersama dalam program kerjasama

---

<sup>13</sup> East Timor is Caught In a Tug of War Between Australian and Tiongkok. Diakses dalam <https://www.youtube.com/watch?v=CusgnKqbL-s> (25/11/2021.15:30.WIB)

<sup>14</sup> Horta, L. 2009. Timor-Leste The Dragon's Newest Friend. Discussing Paper No. 4 – Note the recherche No. 4. Hal. 6-7. Diakses dalam <https://www.irasec.com/ouvrage.php?id=44&lang=en> (25/9/2021.14:30.WIB)

keamanan (*Defence Cooperation Program*) antara Timor-Leste dan Australia dalam isu *maritime security* di Laut Timor, terkait dengan kedekatan Tiongkok di Timor-Leste dalam bidang pertahanan.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Isu yang berkembang mengenai *Maritime Security* di Laut Timor yang terlihat melalui adanya kekhawatiran Australia dan Timor-Leste terhadap kekuatan laut (*Sea Power*) yang sedang dibangun oleh Tiongkok di Laut Timor, kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Angkatan Laut Timor-Leste dalam menjamin sistem pertahanan yang berpotensi juga terhadap gangguan keamanan masyarakat di pesisir pantai di Laut Timor dalam melakukan aktivitas mereka sebagai nelayan. Melihat pada isu yang ada tersebut, dalam penulisan tesis ini penulis mengajukan pertanyaan mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimana ketegangan yang terjadi antara Australia dan Tiongkok dalam sepuluh tahun terakhir?
2. Bagaimana hubungan kerjasama Pertahanan yang dilakukan antara Timor-Leste dan Tiongkok dalam sepuluh tahun terakhir?
3. Bagaimana Hubungan kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste dalam meningkatkan aspek keamanan militer serta menjamin keamanan maritime di Laut Timor dalam sepuluh tahun terakhir?

#### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, penulis bermaksud untuk memaparkan beberapa tujuan terkait dari tulisan ini, yakni:

- ❖ Penulis mencoba untuk menggambarkan ketegangan yang terjadi antara Australia dan Tiongkok terkait isu keamanan;
- ❖ Untuk menggambarkan hubungan kerjasama bilateral Timor-Leste dan Tiongkok dalam bidang pertahanan;
- ❖ Untuk menggambarkan hubungan kerjasama pertahanan antara Timor-Leste dan Australia dalam bidang pertahanan melalui *Defence Cooperation Program (DCP)*.

### 1.5.2 Kegunaan Penelitian

- ❖ Untuk memberikan kontribusi kepada penelitian selanjutnya dalam memahami perkembangan dari program kerjasama pertahanan (*Defence Cooperation Program*) yang telah dibangun antara Timor-Leste dan Australia selama satu dekade terakhir.
- ❖ Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan/referensi bagi kedua negara yakni Timor-Leste dan Australia dengan kebijakan pertahanan yang produktif terkait program kerjasama pertahanan (*Defence Cooperation Program*) untuk menjamin keamanan kedua negara secara nasional dan regional yang lebih baik kedepannya di kawasan Laut Timor.

### 1.6 Literatur Terdahulu

Literature review digunakan dengan tujuan untuk menelusuri perkembangan informasi terkait penelitian tesis ini dan untuk memahami perkembangan topik tesisnya. Maka penulis memperlihatkan beberapa penelitian yang telah ada sebagai berikut:

***Literatur Pertama:*** Kepentingan Keamanan Nasional Australia Dalam Pelaksanaan Kerjasama *Defence Cooperation Program* di Timor-Leste Tahun 2002-2012,<sup>15</sup> oleh Nancy Louisa Angkie, Ni Wayan Rainy Priyadarshani, dan Anak Agung Ayu Intan Prameswari. Dalam penelitian tersebut para peneliti lebih memfokuskan untuk melihat kepentingan-kepentingan keamanan nasional Australia yang ingin dicapai melalui terbentuknya *Defence Cooperation Program* dengan dalil untuk membangun lembaga pertahanan nasional Timor-Leste yang lebih mapan, profesional dan mandiri.

Dari hasil analisis yang dilakukan para peneliti dalam penelitian mereka, dengan konsep kepentingan nasional, bahwa pentingnya keamanan nasional Australia dalam sektor keamanan militer (*military security*) untuk melindungi diri dari serangan bersenjata (*direct arm attack*), sehingga Australia menginginkan stabilitas bagi negara-negara tetangga, salah satunya adalah Timor-Leste. Dimana Timor-Leste sendiri dengan sistem pertahanan yang masih lemah bisa diintervensi

---

<sup>15</sup> Angkie, N. dkk. (2016) “Kepentingan Keamanan Nasional Australia Dalam Pelaksanaan Kerjasama *Defence Cooperation Program* di Timor-Leste Tahun 2002-2012”, Bali. FISIP Universitas Udayana, Jurnal Hubungan Internasional.

atau dikuasai oleh kekuatan militer asing yang dianggap mengancam dan menyerang Australia. Serta pentingnya keamanan nasional Australia dalam sektor keamanan maritim dengan membangun pertahanan nasional Timor-Leste yang baik agar tidak dijadikan transit untuk berbagai aktivitas ilegal. Dari hasil penelitian tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa, keamanan Australia memiliki keterkaitan dan tidak terlepas dari keamanan negara-negara di sekitarnya termasuk Timor-Leste, sehingga *Defence Cooperation Program* menjadi bagian penting dalam strategi keamanan Australia yang dilakukan demi memenuhi kepentingan keamanan nasionalnya dalam sektor keamanan militer maupun maritim.

**Literatur Kedua:** Kepentingan Australia Dalam Perjanjian Maritim Dengan Republik Demokratik Timor-Leste Tahun 2018, oleh Mutia Hairani.<sup>16</sup> Dalam penelitian tersebut Hairani lebih memfokuskan analisisnya terhadap keputusan Australia untuk menerima perjanjian maritim dengan Timor-Leste pada tahun 2018. Dimana sebelumnya Australia dan Timor-Leste tidak memiliki batas laut yang permanen dan memisahkan keduanya di teritorial laut Timor, dikarenakan perbedaan prinsip dalam cara kerja menentukan batas maritim. Australia menginginkan batas laut dibuat berdasarkan prinsip perpanjangan alamiah landas kontinen, sedangkan Timor-Leste menginginkan batas laut dibuat dengan menggunakan garis tengah antara kedua negara. Selanjutnya, keputusan Australia yang menerima kesepakatan batas laut dengan ditarik perbatasannya berdasarkan garis tengah yang diajukan oleh pihak Timor-Leste tentang konsiliasi wajib yang tidak mengikat untuk menyelesaikan sengketa batas laut ke *Permanent Court of Arbitration (PCA)*. Hal tersebutlah yang menurut Hairani menimbulkan pertanyaan tentang kepentingan Australia di balik keputusannya tersebut.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Hairani dalam penelitiannya, dengan pendekatan Kebijakan Luar Negeri dan konsep Kepentingan Nasional hanya untuk pemenuhan dalam kepentingan nasional Australia, serta menganalisis keputusan Australia tersebut dilihat juga dari pendekatan Neorealisme bahwa Kawasan Laut Timor memiliki potensi ekonomi yang melimpah yang dapat membantu Australia untuk meningkatkan akumulasi kekuatan negaranya. Sehingga Hairani

---

<sup>16</sup> Hairani, M. (2019). "Kepentingan Australia Dalam Perjanjian Maritim Dengan Republik Demokratik Timor-Leste Tahun 2018", Riau. FISIP Universitas Riau, JOM. Vol. 6, Edisi 2.

menyimpulkan bahwa, Australia memiliki kepentingan dalam perjanjian maritime tahun 2018 yang meliputi kepentingan ekonomi bagi negaranya, dukungan ekonomi bagi Timor-Leste, serta konsistensi Australia untuk mendukung penyelesaian sengketa maritim secara damai.

**Literatur Ketiga:** *A Maritime Strategy for Timor-Leste*, oleh Letnan Duarte Borges.<sup>17</sup> Dalam penelitian tersebut Duarte memfokuskan penelitiannya pada pandangan strategis Timor-Leste berdasarkan posisi geografis, tantangan kebijakan keamanan maritim, dampak strategis bagi Australia dan Indonesia, jalan ke depan melalui pengembangan tata kelola maritim terpadu, program keamanan maritim, dan koordinasi di tingkat regional dan internasional.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapkan kepada kebijakan keamanan maritim yakni: Kebijakan Pemerintah yang memiliki kemampuan respon yang kecil namun kompeten dan sistem hukum yang melibatkan disinsentif finansial untuk kegiatan ilegal, sehingga diperlukannya suatu rancangan kebijakan keamanan maritim nasional yang menempatkan laut sebagai jantung operasionalisasi strategi besar nasional yang dikhususkan untuk strategi keamanan internasional dan pembangunan; *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (UIU Fishing)* dimana Timor-Leste gagal memerangi UIU dan gagal ikut berpartisipasi sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO); Kapasitas untuk mengurangi dan mengontrol *UIU Fishing* Timor-Leste merumuskan undang-undang khusus untuk menangani penangkapan ikan UIU asing; Kelemahan Institusi Pemerintah dalam mengungkapkan keamanan nasional mengenai pendekatan terhadap keamanan dan bagaimana pencapaian keamanan yang diharapkan dengan kebijakan nasional yang melibatkan keputusan penting mengenai sektor keamanan baik berpengaruh secara internal maupun eksternal negara dan masyarakat; Masalah yang dihadapi Angkatan Laut memerangi *UIU Fishing* terlihat dalam kurangnya pemerintah melihat lebih dalam tentang masalah keamanan maritim sebagai sumber kontrol laut, ancaman terhadap sumber daya alam, lalu lintas manusia, obat-obat terlarang, penangkapan ikan ilegal dan tentu saja perlindungan negara terhadap ancaman persenjataan belum ada,

---

<sup>17</sup> LOE, D. B. (2021). "A Maritime Strategy for Timor-Leste". Royal Australia Navy, Sea Power Soundings: Issue. 20.

tetapi ancaman-ancaman berupa konvensional; Implikasi strategi untuk Timor-Leste, Indonesia dan Australia dengan adanya ketidaksesuaian strategi kebijakan Indonesia dengan sejarah Timor-Leste dan tindakan Australia di kawasan itu menciptakan kesulitan bagi keterlibatan trilateral Australia di kawasan tersebut.

Dari hasil penelitian yang ditemukan disimpulkan bahwa Timor-Leste sebagai negara kepulauan dengan wilayah maritim yang luas perlu melindungi kepentingan maritimnya dari berbagai ancaman melalui kebijakan keamanan maritim yang kredibel dan harus lebih mengembangkan dan meningkatkan kemampuan angkatan lautnya. Pemerintah perlu memperhatikan ancaman dan mengembangkan tindakan yang efektif serta menetapkan pandangan strategis untuk Timor-Leste berdasarkan pertimbangan geografis, rezim tata kelola maritim terpadu, dan pertimbangan tentang bagaimana program keamanan maritim Australia dapat membantu. Selain itu perlu menciptakan kerangka kerjasama keamanan secara bilateral dan multilateral di kawasan, serta keterlibatan internasional untuk mengatasi masalah keamanan maritim yang menjadi masalah global.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual sebagai produk yang menjelaskan dalam bentuk grafik atau narasi, dan memberikan hubungan hipotesis antara hal utama yang akan dipelajari, seperti faktor kunci, konsep, dan variabel, pada visual atau produk tertulis. Kerangka konseptual juga menjadi salah satu hal yang esensial sebagai alat analisis berdasarkan teori atau konsep ilmiah lainnya dalam studi Hubungan Internasional. Hal ini juga digunakan untuk menyederhanakan analisis data dan untuk mempersempit masalah penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Sehingga untuk membantu peneliti dalam menganalisis pertanyaan yang mendasar, yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan konsep kerjasama dan konsep keamanan Maritim (*Maritime Security*).

### **1.7.1 Konsep Kerjasama**

Menurut Holsti dalam Utami menyatakan bahwa sebuah hubungan kerjasama yang dibangun antar negara dikarenakan adanya berbagai masalah nasional, regional dan atau global yang memerlukan perhatian lebih melalui pendekatan

dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar atau mendiskusikan masalah yang diakhiri dengan suatu perjanjian yang dapat memuaskan semua pihak.<sup>18</sup>

Robert O. Keohane dan Robert Axelrod juga menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan mutualitas kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*)<sup>19</sup>. Dalam bayangan masa depan mencakup empat faktor, yaitu jangka waktu harapan masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi tentang tindakan aktor-aktor lain, dan umpan balik yang cepat dalam suatu kerjasama.

Dari pengertian tentang kerjasama yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dipaparkan di atas, dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa Timor-Leste dan Australia sebagai sebuah negara yang memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk menjaga keamanan baik secara internal maupun eksternal dari kedua negara. namun dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan jumlah aktor sebagai standar keberhasilan, karena aktor dalam penelitian ini adalah Timor-Leste dan Australia serta Tiongkok, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam proses penelitian dalam menjawab kekhawatiran yang ada, sebagaimana yang dikemukakan Keohane dan Axelrod tentang kerjasama.

Selain itu, Buzan juga memaparkan bahwa kerjasama antara negara tidak selalu melihat pada kekuasaan semata, melainkan juga dapat terjalin melalui suatu pola hubungan yang bermanfaat.<sup>20</sup> Pernyataan ini juga berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang kerjasama yang dibangun antara Timor-Leste dan Australia dalam Program Kerjasama Pertahanan (*Defence Cooperation Program*).

---

<sup>18</sup>Utami, P. 2016. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi *Human Trafficking* di Batam. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 4, 2017: 1257-1272. hal 1261. Diakses dalam [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20\(10-27-17-03-10-55\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf) (24/11/2021. 16:32. WIB).

<sup>19</sup> Bagaskara, A. M. 2018. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 369, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21045/19696.pdf> (27/10/2021.15:30.WIB)

<sup>20</sup> Buzan, *People, State, and Fear*. Op.Cit, Hal. 189.

### 1.7.2 Konsep Keamanan Maritim (*Maritime Security Concept*)

Definisi keamanan, menurut Buzan adalah dimana suatu negara dan masyarakatnya yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka dari kekuatan luar yang dianggap sebagai musuh agar bebas dari suatu ancaman tertentu.<sup>21</sup> Sedangkan ancaman itu sendiri oleh Ullman merupakan suatu keadaan yang secara cepat dapat menurunkan tingkat kualitas hidup penduduk di suatu negara.<sup>22</sup> Dari definisi tentang keamanan dan ancaman yang diberikan oleh Buzan dan Ullman di atas, jika dikaitkan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, maka terlihat bahwa ada kekhawatiran terjadinya aktivitas-aktivitas baik kejahatan non-tradisional maupun kejahatan tradisional yang dapat merugikan kedua negara (Timor-Leste dan Australia), sehingga diperlukan keamanan yang baik agar terjamin stabilitas keamanan.

Selanjutnya Buzan juga menyatakan bahwa konsep keamanan yang memiliki sifat mencegah dan antisipatif dalam merespon ancaman sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki suatu negara.<sup>23</sup> Dengan demikian, sangat diperlukan adanya kerjasama keamanan baik secara lokal, regional, maupun global, karena keamanan akan sulit diperoleh hanya dengan kekuatan negara sendiri. Pada tingkat analisis negara Buzan mendefinisikan negara sebagai entitas yang memiliki teritorial dan berdaulat secara politik. Istilah keamanan nasional (*national security*) dan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pengertian lebih populer sebagai slogan politik dan kelompok kepentingan untuk membenarkan kebijakan pemerintah.

Konsep keamanan maritim yang diperkenalkan oleh Lutz Feldt adalah bahwa *maritime security* merupakan kombinasi langkah pencegahan dan responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan tindakan ilegal.<sup>24</sup> Dalam pengertiannya, menunjukkan bahwa upaya preventif dan responsif diperlukan untuk menegakkan hukum baik sipil maupun militer serta operasi pertahanan yang

---

<sup>21</sup> Barry Buzan, —People, State, and Fear: The National Security Problem in International Relations, (Sussex: Wheatsheaf Book, 1993), 93

<sup>22</sup> Richard H. Ullman, —Redefining Security, International Security vol. 8, No.1 (Summer 1983), 133 [Jurnal online] diakses di [https://www.jstor.org/stable/2538489?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/2538489?seq=1#page_scan_tab_contents) (11/11/2021. 14:30. WIB)

<sup>23</sup> Buzan, People, State, 271-291

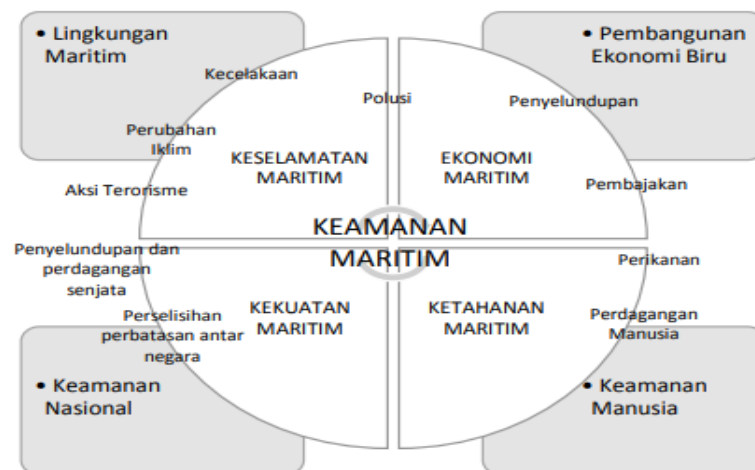
<sup>24</sup> Lutz Feld, dkk. *Maritime Security - Perspectives for a Comprehensive Approach*. ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security. 2013. Hal. 2.



dilakukan angkatan laut. Isu-isu yang yang diperhatikan juga terutama meliputi keselamatan navigasi, pemberantasan kejahatan transnasional termasuk didalamnya adalah isu terorisme maritim dan pembajakan laut, serta pencegahan dan penyelesaian konflik.

Berikut terdapat beberapa elemen dalam keamanan laut yang diperkenalkan oleh Lutz Feldt adalah menginginkan perdamaian dan keamanan internasional serta nasional; kedaulatan, integritas dan kemerdekaan politik; keamanan jalur komunikasi laut; perlindungan keamanan dari kejahatan di laut; keamanan sumber daya, akses ke sumber daya di laut dan ke dasar laut; perlindungan lingkungan; keamanan semua pelaut dan nelayan.<sup>25</sup> selanjutnya Lutz merumuskan poros maritime security yang tampak dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Poros Keamanan Maritim (Lutz Feldt)



Dalam konsep yang diberikan oleh Lutz Feldt untuk mencapai *Maritime Security* memiliki empat elemen utama yaitu keselamatan maritim, ekonomi maritim, kekuatan maritim, dan ketahanan maritim. Namun dalam penulisan tesis ini penulis hanya fokus pada elemen kekuatan maritim untuk melihat kombinasi langkah pencegahan dan responsif yang dilakukan oleh Timor-Leste dan Australia dalam kerjasama pertahanan yang dibangun untuk menjamin keamanan di Laut Timor.

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 3.

### 1.7.3 Konsep Keamanan Militer

Dalam menjamin keamanan nasional suatu negara, diperlukannya kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya dari ancaman luar. Galbreath dan Deni mengemukakan bahwa "*Actors safeguard themselves from instabilities to guarantee freedom from vulnerabilities. And they defend against the direct threat to their existence. Traditionally, actors within the international system are states and to this day they are the main holders of military capabilities*".<sup>26</sup> Yang mana dapat dijelaskan bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang menjadi pemeran utama kemampuan militer untuk melindungi diri dari ketidakstabilan dalam menjamin kebebasan dari kerentanan, dan secara langsung melawan ancaman terhadap keberadaan negara tersebut. Sehingga elemen yang sangat penting dalam keamanan nasional adalah sektor keamanan militer.

Dalam buku pegangan yang berjudul *Routledge Handbook of Defence Studies*, Galbreath dan Deni memperlihatkan beberapa keunggulan studi pertahanan dalam praktik pertahanan dan operasi serta taktik, yaitu anggaran pertahanan, pengadaan pertahanan, perekrutan dan retensi untuk mempertahankan kekuatan militer sukarela, pendidikan militer profesional, logistik militer, doktrin militer, strategi, budaya pertahanan strategis antara kekuatan dan aturan, hubungan sipil-militer serta operasi gabungan bersama.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa bagian yang dipaparkan oleh Galbreath dan Deni untuk melihat hubungan kerjasama pertahanan yang dibangun antara Timor-Leste dan Australia dalam program *Defence Cooperation Program*, yaitu pendidikan militer profesional (*Professional Military Education*), operasi gabungan bersama (*Joint Combined Operations*), logistik militer (*Military Logistic*), serta pengadaan pertahanan (*Defence Procurement*).

#### **Pendidikan Militer Profesional (*Professional Military Education / PME*)**

Konsep PME menurut GEN Richardson (US. Army), bahwa pelatihan dan pendidikan militer telah terbukti menjadi jalan yang pasti berkompetensi, untuk standar yang tinggi, dan untuk kemenangan.<sup>27</sup> Menurut Matthew bahwa,

---

<sup>26</sup> Galbreath, D.J. & Deni, J.R., "*Routledge Handbook of Defence Studies*", Routledge. London & New York, 2018. Hal. 29.

<sup>27</sup> Ibid. Hal. 98

pendidikan militer diadakan sebagai sarana untuk tujuan bukan tujuan itu sendiri, dimana pasukan dikirim ke medan perang tentunya lebih penting untuk mempelajari pertempuran itu sendiri, daripada cara untuk menyusun tinjauan setelah aksi.<sup>28</sup>

Sehingga Galbreath dan Deni menambahkan bahwa pendidikan militer untuk mempersiapkan personil dalam menghadapi skenario baru dan tak terduga. Pelatihan terlihat sebagai sarana untuk menciptakan keterampilan praktis dan teknis dasar yang diperlukan untuk menopang militer berfungsi, yang umumnya berorientasi pada spesialisasi militer tertentu, mulai dari pilot pesawat tempur hingga pelatihan senapan, atau teknik mesin hingga kebugaran fisik.

### **Logistik dan Pengadaan Militer (*Military Logistic and Procurement*)**

Galbreath dan Deni memaparkan bahwa sistem logistik yang efektif harus mengarahkan sumber daya yang melimpah untuk memastikan pertempuran, elemen pendukung akan dapat menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai efek operasional yang diinginkan. Galbreath dan Deni juga memperkenalkan beberapa akses mengenai setiap analisis logistik yang bergantung pada basis dukungan depan harus menyertakan parameter yang ditetapkan berikut dalam proses pemilihan lokasi dukungan tempur yang optimal.<sup>29</sup>

Sedangkan pengadaan pertahanan merupakan proses dimana negara memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh angkatan pertahanan yang merupakan kegiatan utama negara modern untuk memungkinkan dapat mempertahankan kedaulatan dan menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Dalam upaya untuk melengkapi kebutuhan militer, pertahanan nasional perlu dua kategori barang yakni standar produk sipil (termasuk makanan, alat tulis, dan pakaian) yang dibeli secara rutin dengan biaya satuan yang rendah, serta sistem senjata utama (termasuk jet tempur, kendaraan tempur lapis baja, amunisi dan kapal induk) yang jarang dibeli dalam jumlah yang kecil dalam biaya satuan yang tinggi.

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid. Hal. 120-121.

### **Latihan/Operasi Gabungan Bersama (*Joint Combined Operation*)**

Dalam konsep ini, menurut Galbreath dan Deni bahwa Operasi gabungan merupakan operasi yang mencakup dua atau lebih dari dinas militer di bawah satu komando untuk mencapai tujuan kebijakan pertahanan. Dalam peningkatan kemampuan pasukan darat, laut, udara, ruang angkasa, dan dunia maya membutuhkan kontrol yang lebih terkoordinasi berkaitan dengan strategi pertahanan.

Selanjutnya dalam konsep latihan/operasi militer bersama (*Joint Combined Operation*), Galbreath dan Deni memperkenalkan tiga bagian dalam pelatihan atau operasi yaitu: rencana latihan/operasi bersama (*Joint Operation Planning*), analisis lanjutan (*Advanced analysis*), serta komando dan kontrol (*Command and Control*).<sup>30</sup>

### **1.8 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Dimana dalam metode penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini untuk mendapatkan makna secara objektif. Pendekatan kualitatif melihat dari karakter atau ciri khasnya juga lebih memperhatikan proses pengumpulan variabel, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang terjadi antara satu sama lain. selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai penunjang penelitian seperti: jurnal, buku, situs resmi, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang telah ditentukan.

Selanjutnya dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian berupa studi kasus yang mana lebih memfokuskan untuk analisis kerjasama yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste dalam bidang keamanan khususnya keamanan laut di Laut Timor melalui Program Kerjasama Pertahanan (*Defence Cooperation Program/DCP*), yang mencakup:

1. Kerjasama kedua negara untuk menjamin keamanan laut di Laut Timor yang berkelanjutan;

---

<sup>30</sup> Galbreath & Deni, Op. Cit. Hal. 249-251.

2. Analisis mendalam terhadap kerjasama yang dilakukan antara kedua negara untuk lebih mempersiapkan diri atau melakukan tindakan preventif dan responsif dalam menghadapi ancaman dan dampak yang bisa merugikan kedua negara.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis merencanakan penulisan tesis ke depan setelah memaparkan Bab I tentang Pendahuluan, dan dalam Bab II, penulis ingin memaparkan konsep dan teori mengenai keamanan maritim, dan pada bagian Bab III penulis juga memaparkan hubungan Australia dan Tiongkok serta Kerjasama Pertahanan Timor-Leste – Tiongkok periode 2013-2022 dan dalam Bab IV penulis memaparkan Kerjasama *Defence Cooperation Program* Antara Timor-Leste dan Australia Periode 2013-2022, dan dalam Bab V merupakan bab penutup untuk penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan rekomendasi bagi Timor-Leste dalam meningkatkan Angkatan Pertahanannya.